

Implementasi Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Watudemba Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan

Mita¹⁾, Selfiana²⁾, Arsalim^{3*)}

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sulawesi Tenggara

²Program Studi, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sulawesi Tenggara

³Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara

*Corresponding author. dr.arsalim2021@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Implementasi, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Desa Watudemba

How to cite:

Mita, Selfiana (2025, Implementasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Watudemba Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan.



ABSTRACT

Tujuan dalam penelitian adalah mengetahui dan menganalisis implementasi Gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Watudemba Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; a) Komunikasi dalam implementasi gerakan PKK di Desa Watudemba telah dilaksanakan dengan baik dengan pemerintah desa, pengurus dan kader. Dapat dilihat dari terimplementasinya program-program PKK melalui kejelasan informasi, konsistensi pesan dari tingkat atas sampai ke desa dan adanya saluran komunikasi efektif yang digunakan. b) Sumberdaya dalam implementasi gerakan PKK di Desa Watudemba telah tersedia yaitu pengurus, kader dan anggota masyarakat sehingga program-program pokok PKK dapat berjalan dengan baik. Meskipun sumber daya keuangan kegiatan PKK masih terbatas. c) Disposisi (sikap pelaksana) telah berjalan dengan baik sehingga implementasi gerakan PKK di Desa Watudemba telah memberikan manfaat bagi masyarakat. d) Struktur birokrasi telah ada dalam organisasi PKK sesuai dengan pedoman, sehingga implementasi gerakan PKK di Desa Watudemba telah berjalan dengan baik. Masing-masing pengurus mempunyai tanggung jawab sesuai dengan tugasnya atau kelompok kerjanya. Dalam penelitian ini disarankan perlunya meningkatkan alokasi anggaran PKK melalui Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendorong kegiatan 10 program pokok PKK. Selain itu perlunya peningkatan kapasitas pengurus PKK melalui pelatihan dibidang perencanaan dan pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi yang intensif kepada generasi muda khususnya kaum perempuan desa agar berpartisipasi dalam kegiatan PKK

1. Pendahuluan

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam rangka memberdayakan keluarga agar mampu meningkatkan kesejahteraannya. Sejak dicanangkan pada tahun 1957 dan berkembang secara nasional pada era 1970-an, gerakan PKK telah menjadi instrumen strategis

dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam hal pemberdayaan perempuan, kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga ketahanan pangan.

Dalam konteks pembangunan pedesaan, PKK berperan penting sebagai mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bersifat partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan. Namun, efektivitas implementasi gerakan ini sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, serta dukungan dari pemangku kepentingan lainnya. Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama kaum perempuan. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat.

Di tingkat desa, PKK menjadi motor penggerak dalam upaya pemberdayaan perempuan dan keluarga sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional. Partisipasi aktif dalam pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan keluarga adalah tujuan gerakan PKK. PKK berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan melalui berbagai kegiatan. Selama bertahun-tahun, PKK menghadapi banyak tantangan, termasuk partisipasi masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan dukungan pemerintah setempat. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan program PKK dipengaruhi oleh dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat desa yang masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan sering kali menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKK. Akibatnya, diperlukan pendekatan yang lebih efisien untuk meningkatkan partisipasi PKK dan optimalisasi program untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang lebih baik.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan untuk membangun masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan tujuan mewujudkan keluarga yang beriman dan bermoral. Dalam buku "Pembangunan Manusia Berbasis Gender" (dalam Anggie Sugita, 2022), keberhasilan program pembangunan pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat bergantung pada peran dan pemanfaatan seluruh potensi sumberdaya manusia sebagai aktor dan penerima manfaat dari hasil pembangunan. Wanita Indonesia adalah sumber daya penting, dan mereka memiliki potensi yang sangat besar untuk menentukan keberhasilan pembangunan. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan. Di Desa Watudemba, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, pelaksanaan program PKK memainkan peran penting dalam pembangunan berbasis keluarga, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rumah tangga. Namun, bagaimana implementasi gerakan PKK di Desa Watudemba Kecamatan Palangga masih memerlukan kajian akademik untuk mengetahui sejauh mana implelementasi program tersebut berhasil dilaksanakan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah inisiatif dalam pembangunan masyarakat. Ini dimulai dengan Seminar Ekonomi Rumah Tangga di Bogor pada tahun 1957, yang menghasilkan sepuluh Segi Kehidupan Keluarga. Pada tahun 1961, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengikuti langkah ini dan menetapkan Segi Kehidupan Keluarga sebagai Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Pendidikan Masyarakat atau PENMAS adalah lembaga yang mengajarkan kurikulum ini.

Dalam konteks kesejarahan tersebut, kegiatan dan program-program PKK awalnya merupakan akronim dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, dan tujuannya adalah untuk mendorong

partisipasi perempuan melalui program pendidikan perempuan. Namun demikian pada tanggal 27 Desember 1972, organisasi tersebut berubah nama menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Tujuannya adalah untuk membangun dan membina keluarga di bidang mental, spiritual, dan fisik, serta meningkatkan kualitas makanan, pakaian, kesehatan, dan lingkungan hidup. Dengan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PKK dapat menggerakkan anggotanya yang terdiri dari Tokoh Pemuka Masyarakat, isteri Kepala Dinas/Jawatan, dan isteri Kepala Daerah hingga tingkat Desa dan Kelurahan serta kecamatan.

Sejak tahun 1999, kepanjangan PKK diubah lagi namanya menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga akibat dari karena reformasi tahun 1998, sehingga memunculkan paradigma baru, dan semangat otonomi daerah sesuai dengan UU No.22 tahun 1999 pada waktu itu. Kata "pemberdayaan perempuan" dipilih karena mengandung pengertian usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pemberdayaan dsalam konteks ini menjadikan perempuan sebagai obyek dan subyek pembangunan khususnya di pedesaan . Dari sisi programnya, PKK pada awalnya diarahkan untuk mendorong kemajuan perempuan agar dapat memainkan peran gandanya secara baik, yaitu sebagai pengelola keluarga, pencari nafkah dan pelaku pembangunan. Akan tetapi sesuai dengan perkembangannya, program pemberdayaan perempuan kemudian diarahkan untuk mewujudkan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian sasarannya ditujukan untuk mengembangkan dan mengangkat berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama terhadap sumber pembangunan (Aslichati, dalam Anggie Sugita,2022).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, 10 program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mencakup:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Kegiatan gotong royong
3. Bidang Pangan
4. Bidang Sandang
5. Bidang Perumahan dan tata laksana rumah tangga:
6. Bidang Pendidikan dan eterampilan:
7. Bidang Kesehatan :
8. Bidang Pengembangan kehidupan berkoperasi :
9. Bidang Kelestarian lingkungan hidup :
10. Bidang perencanaan sehat Meningkatkan kegiatan dalam program perencanaan sehat

2.2. Teori Implementasi Kebijakan

"Implement" adalah kata asal, yang berarti "melaksanakan" atau "menjalankan". Implementasi dalam kebijakan publik adalah proses mengubah kebijakan yang telah ditetapkan menjadi tindakan praktis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Edwards III (1980), implementasi adalah langkah penting dalam siklus kebijakan yang menentukan seberapa efektif pencapaian tujuan kebijakan. George Edward III membuat teori implementasi kebijakan publik yang menekankan bahwa pencapaian suatu hasil dari implementasi kebijakan yang dilaksanakan akan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Edward III memberikan kerangka kerja yang sederhana namun mendalam untuk memahami bagaimana menerapkan kebijakan publik dalam organisasi dan pemerintahan.

A. Komunikasi

Komunikasi sangat penting untuk menerapkan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa penyebaran informasi terkait kebijakan kepada pelaksana sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Informasi harus konsisten, jelas, dan mudah dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Ada kemungkinan besar bahwa kebijakan tidak akan diterapkan sesuai tujuan awal jika komunikasi gagal.

Aspek penting komunikasi adalah sebagai berikut :

- **Kejelasan informasi:** Kebijakan harus ditulis dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami.
- **Konsistensi pesan:** Penjelasan kebijakan harus konsisten atau tidak ada kontradiksi.
- **Penyampaian yang cepat dan akurat:** Pelaksana harus menerima informasi kebijakan tepat waktu untuk mendukung implementasinya.

B. Aspek Sumber Daya

Aspek Sumber daya dalam teori ini berhubungan dengan anggaran, personel, waktu, dan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Edward III menekankan bahwa tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan akan menemui banyak hambatan.

Jenis Sumber Daya yaitu :

- **Manusia:** Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan kebijakan.
- **Finansial:** Anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program atau kegiatan.
- **Teknologi dan Fasilitas:** Peralatan dan teknologi yang relevan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.

C. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi mengacu pada sikap, motivasi, dan komitmen dari para pelaksana kebijakan. Edward III menyatakan bahwa sikap pelaksana terhadap kebijakan sangat memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi. Jika pelaksana tidak mendukung kebijakan atau tidak memiliki motivasi yang tinggi, maka pelaksanaan kebijakan dapat terhambat.

Faktor yang mempengaruhi Disposisi, yaitu :

- Pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan.
- Tingkat kepuasan pelaksana terhadap kebijakan yang ditetapkan.
- Insentif atau penghargaan yang diberikan kepada pelaksana.

D. Aspek Struktur Birokrasi

Dalam konteks aspek struktur birokrasi yang kompleks dapat memperlambat kegiatan dalam melakukan implementasi kebijakan. Edward III menekankan bahwa prosedur yang terlalu rumit, koordinasi yang buruk, serta hierarki yang tidak efisien dapat memperlambat proses implementasi.

Komponen Struktur Birokrasi, meliputi :

- **Standar Operasional Prosedur (SOP):** Prosedur yang jelas dan sederhana mendukung efisiensi implementasi kebijakan.
- **Pembagian Tugas:** Harus ada distribusi tugas yang jelas antarunit atau individu.
- **Koordinasi Antarinstansi:** Penting untuk menciptakan sinergi antara lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Teori implementasi George Edward III memberikan panduan yang jelas untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan publik. Dengan memastikan bahwa komunikasi yang baik, memiliki sumber daya memadai, Adanya sikap pelaksana positif, dan struktur birokrasi efisien, peluang keberhasilan implementasi kebijakan akan meningkat secara signifikan. Namun, dalam praktiknya, setiap variabel ini perlu diperhatikan secara holistik, mengingat adanya interaksi dan saling ketergantungan di antara mereka

3. Metode Penelitian

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Watudemba Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus PKK dan masyarakat setempat. Informan dipilih secara purposive untuk mendapatkan data yang relevan dan mendalam yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

1. Study Kepustakaan (Library Study) yakni mengumpulkan data-data dengan cara membaca, menelaah dokumen, dan menguji data-data hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tulisan ini.
2. Wawancara mendalam dengan informan untuk mendapatkan informasi kualitatif tentang implementasi gerakan PKK di Desa Watudemba Kecamatan Palangga
3. Observasi langsung di lapangan di Desa Watudemba
4. Studi dokumentasi dari laporan-laporan yang ada di Desa Watudemba, khususnya di Kantor PKK Desa Watudemba.

3.4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan di lapangan selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu semua sumber data yang diperoleh di lapangan yang telah dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang berhubungan dengan kajian atau permasalahan dalam penelitian tentang implementasi gerakan PKK di Desa Watudemba .

4. Hasil dan Pembahasan

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam rangka memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan. Di tingkat desa, gerakan ini memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan berbasis keluarga dan masyarakat, khususnya melalui 10 Program Pokok PKK. Di Desa Watudemba, Kecamatan Palangga, pelaksanaan gerakan PKK menjadi bagian integral dari upaya pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Berikut pernyataan Kepala Desa Watudemba (**ibu Nerni**) tentang dukungan terhadap program PKK:

“...Saya sebagai Kepala Desa memandang bahwa peran PKK sangat penting dalam memperkuat ketahanan keluarga dan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, bentuk dukungan yang kami berikan antara lain: Menyediakan fasilitas dan anggaran desa yang mendukung pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan prioritas pembangunan desa; mendorong keterlibatan seluruh perangkat desa dan lembaga masyarakat desa dalam mendukung kegiatan PKK; memastikan kegiatan PKK terintegrasi dengan program pembangunan desa sehingga kegiatannya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan membangun koordinasi yang baik

antara Pemerintah Desa dan Tim Penggerak PKK untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan...". (wawancara tanggal 3 April 2025)

Dalam membahas implementasi Gerakan PKK di Desa Watudemba Kecamatan Palangga, maka teori implementasi kebijakan George Edward III (1980) menjadi landasan yang relevan. Teori ini mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan pendapat informan yang diperoleh melalui wawancara, diskusi, dan observasi, pembahasan terhadap implementasi gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Desa Watudemba, dirinci sebagai berikut:

4.1.1. Komunikasi

Komunikasi menjadi aspek awal dan krusial dalam menjembatani tujuan kebijakan dengan tindakan di lapangan. Komunikasi dalam konteks ini mencakup kejelasan informasi, konsistensi pesan, dan efektivitas saluran komunikasi antara pengambil kebijakan, pelaksana, dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Implementasi komunikasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di Desa Watudemba;

1. Kejelasan Informasi

Di Desa Watudemba, informasi mengenai program PKK umumnya disampaikan melalui pertemuan rutin, media sosial kelompok, dan papan informasi desa. Setiap kegiatan disampaikan secara jelas sesuai agenda kegiatan PKK dalam satu bulan, tiga bulan, 6 bulan dan 1 tahun. Pelaksanaan program "Hatinya PKK" (Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman), senantiasa disosialisasikan kepada seluruh kader dan masyarakat secara berkala dan juga kegiatan lain yang sebagai implementasi dari 10 program pokok PKK.

Pernyataan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Watudemba (**Ibu Nurdiana**) berkaitan dengan informasi yang disampaikan kepada anggota tim PKK dan kegiatan-kegiatan PKK yang akan dilakukan :

"....Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Watudemba, saya menyadari bahwa kejelasan informasi merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung kelancaran, partisipasi, dan transparansi dalam setiap terhadap pelaksanaan giat oleh PKK di tingkat desa...Saya sebagai ketua sebelum acara dan sesudah kegiatan PKK senantiasa melakukan yaitu menyampaikan informasi kegiatan secara terbuka kepada seluruh kader dan masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial/whatssup grup dan papan informasi desa. Juga setiap kegiatan PKK telah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Saya juga melibatkan seluruh kader PKK yang aktif dalam giat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, agar informasi yang diterima tidak hanya jelas, tetapi juga dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak. Untuk pertanggungjawaban kegiatan, saya dan pengurus PPK Desa membuat dokumentasi dan pelaporan kegiatan, agar setiap anggota maupun masyarakat umum dapat mengetahui capaian dan arah kegiatan PKK secara jelas.....Saya percaya bahwa dengan komunikasi yang baik dan informasi yang jelas, kegiatan PKK akan lebih efektif dalam mendukung pembangunan keluarga sejahtera di Desa Watudemba..." (wawancara 3 April 2015)

2. Konsistensi Pesan

Implementasi yang berhasil menuntut adanya pesan kebijakan yang konsisten dari pemerintah pusat ke tingkat lokal. di Desa Watudemba. Oleh sebab itu segenap pengurus PKK Desa Watudemba konsisten melaksanakan agenda kegiatan PKK dan petunjuk teknis

dari PKK Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris PKK Desa Watudemba (**Ibu Llianti, S.Pd**):

"...Kami di PKK Desa Watudemba selalu berusaha mengikuti arahan dan kebijakan yang berasal dari pusat, provinsi, sampai ke tingkat kabupaten. Pesan-pesan program PKK itu sudah sangat jelas dan konsisten, terutama terkait 10 Program Pokok PKK yang menjadi dasar dalam setiap kegiatan. Biasanya kami menerima informasi melalui pelatihan, sosialisasi, atau buku pedoman yang disampaikan secara berjenjang. Tugas kami di tingkat desa adalah menerjemahkan pesan-pesan itu agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa, tanpa menghilangkan esensi dari program yang sudah ditetapkan oleh pusat. Dengan begitu, garis kebijakan tetap terjaga, tapi tetap bisa diterapkan secara kontekstual di desa kami."(wawancara, tanggal 5 April 2025)

3. Saluran Komunikasi

Berdasarkan wawancara kepada beberapa informan, saluran komunikasi yang digunakan oleh pengurus PKK di Desa Watudemba relatif beragam, misalnya melalui pertemuan tatap muka yang menjadi saluran utama dan saluran melalui Hp atau media sosial seperti WhatsApp group yang sangat efektif menjangkau pengurus dan kader PKK.

Berdasarkan teori Edward C. III, aspek komunikasi menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan PKK di Desa Watudemba. Meskipun telah tersedia berbagai saluran dan mekanisme, masih terdapat tantangan dalam hal kejelasan informasi, konsistensi pesan, dan efektivitas media komunikasi. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kader PKK dalam hal komunikasi strategis, peningkatan sosialisasi program secara berkala, serta penggunaan teknologi informasi yang inklusif agar pesan-pesan kebijakan dapat tersampaikan dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat.

4.1.2. Sumber Daya

Implementasi gerakan PKK di Desa Watudemba sangat tergantung pula pada ketersediaan sumber daya. Implementasi gerakan PKK di Desa Watudemba memerlukan ketersediaan sumber daya dan menjadi penentu utama efektivitas kegiatan. Keterlibatan kader PKK yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, dukungan dana dari pemerintah desa, serta tersedianya sarana pendukung seperti tempat pertemuan dan media informasi sangat berperan dalam kelancaran pelaksanaan program-program PKK. Berikut pernyataan Ketua Pokja 1 PKK Desa Watudemba terkait dengan sumberdaya yang dimiliki oleh pengurus PKK :

"...Kalau bicara soal sumber daya, kami di PKK Desa Watudemba memang tidak memiliki banyak dalam hal anggaran atau fasilitas yang besar, tapi kami punya kekuatan di semangat kebersamaan dan partisipasi kader. Para ibu-ibu sangat aktif dan mau bergerak, walaupun dengan keterbatasan. Kami juga punya didukung oleh pemerintah desa dalam bentuk misalnya dalam bentuk bantuan dana kegiatan, tempat pertemuan, dan pendampingan program. Jadi, walaupun sederhana, sumber daya yang kami miliki cukup untuk menjalankan kegiatan-kegiatan inti seperti penyuluhan keluarga, pembinaan anak, dan kegiatan keagamaan. Yang penting, kami saling mendukung dan punya komitmen yang kuat untuk membina keluarga dan lingkungan di desa ini." (wawancara, tgl 10 April 2025)

Ini menunjukkan bahwa, meskipun ada keterbatasan anggaran atau fasilitas, komitmen dan semangat gotong royong masyarakat serta sinergi antara Pemerintah Desa dan Tim Penggerak PKK telah menjadi sumber daya sosial yang memperkuat implementasi gerakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya tidak semata bersifat material, tetapi juga mencakup aspek sosial dan kultural yang mendukung keberlanjutan gerakan PKK di tingkat desa.

4.1.3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap pelaksana merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi. Sikap ini mencerminkan komitmen, kesediaan, dan motivasi para pelaksana untuk menjalankan kebijakan dan kegiatan sesuai dengan apa yang akan dituju oleh organisasi dimasa kini dan akan datang sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Pada konteks gerakan PKK di Desa Watudemba, sikap pelaksana sangat terlihat dari semangat dan dedikasi para kader PKK dalam menjalankan berbagai kegiatan. Para pelaksana, yang terdiri dari kader dan pengurus PKK, menunjukkan komitmen tinggi meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Mereka tetap aktif menggerakkan program seperti penyuluhan keluarga, pengajian, kegiatan anak dan remaja, serta penguatan ketahanan keluarga. Sikap pelaksana yang positif juga ditunjukkan melalui keterbukaan terhadap arahan dari pemerintah pusat hingga daerah, serta kesediaan untuk berinovasi menyesuaikan program dengan kondisi lokal desa. Dukungan dari kepala desa dan sinergi dengan perangkat desa turut memperkuat motivasi kader PKK dalam melaksanakan tugasnya. Sikap pelaksana yang responsif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, maka gerakan PKK di Desa Watudemba mampu berjalan secara konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan keluarga dan lingkungan sekitar.

Salah seorang informan/masyarakat (kader PKK) menyatakan bahwa mereka mempunyai tanggung dan komitmen dalam membantu masyarakat melalui PKK ;

"Sebagai kader PKK, kami menjalankan kegiatan ini bukan karena diperintah, tapi karena memang ada rasa tanggung jawab dan keinginan untuk membantu masyarakat. Kami sadar bahwa tugas kami mungkin sederhana, tapi kalau dijalankan dengan ikhlas dan serius, dampaknya bisa besar bagi keluarga-keluarga di desa. Walaupun kadang ada keterbatasan waktu atau fasilitas, kami tetap berusaha hadir dan aktif. Kami juga selalu terbuka menerima arahan dari pengurus desa maupun dari atas, karena kami ingin program PKK memberikan keuntungan bagi masyarakat..." (wawancara , tanggal 15 April 2025)

2.1.4. Struktur Birokrasi

Faktor yang penting juga dalam menggapai keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Struktur ini berkaitan dengan sistem organisasi, mekanisme kerja, serta alur koordinasi dan tanggung jawab yang jelas di antara pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi yang baik akan menciptakan efisiensi, kejelasan peran, dan efektivitas pelaksanaan program. Dalam implementasi gerakan PKK di Desa Watudemba, struktur birokrasi ditunjukkan melalui adanya tingkatan organisasi yang teratur, mulai dari Tim Penggerak PKK desa, Pokja-Pokja, hingga keterhubungan dengan PKK tingkat kecamatan dan kabupaten. Setiap tingkatan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang sudah ditetapkan, serta mengikuti pedoman organisasi PKK secara nasional.

Koordinasi antara PKK Desa dengan Pemerintah Desa Watudemba juga berjalan baik. Ketua PKK berperan sebagai mitra kepala desa dalam bidang pemberdayaan keluarga, sementara para ketua Pokja menjalankan program-program sesuai bidang masing-masing seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Struktur ini memungkinkan adanya pembagian tugas yang jelas dan memudahkan pelaporan serta evaluasi kegiatan. Walaupun terdapat tantangan seperti keterbatasan tenaga administrasi atau belum maksimalnya dokumentasi kegiatan, struktur organisasi PKK di Desa Watudemba cukup berjalan efektif berkat kedisiplinan kader dan adanya sistem komunikasi internal yang rutin. Hal ini mencerminkan bahwa struktur birokrasi yang terorganisir menjadi penopang penting dalam keberhasilan gerakan PKK di tingkat desa. Pernyataan ketua tim Penggerak PKK Desa Watudemba berkaitan dengan struktur birokrasi :

"Di PKK Desa Watudemba, struktur organisasi kami sudah mengikuti pedoman dari pusat. Terdapat Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan empat Pokja yang masing-masing punya tugas dan program kerja sendiri. Semua sudah tahu peran dan tanggung jawabnya. Misalnya, Pokja 1 fokus di bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila serta pembinaan keluarga, sedangkan Pokja lain punya bidang masing-masing. Kami juga rutin melakukan rapat koordinasi agar kegiatan berjalan terarah. Dengan struktur yang jelas ini, pekerjaan jadi lebih mudah dibagi dan semua kader bisa fokus sesuai tugasnya..." (wawancara 25 April 2025)

Implementasi gerakan PKK di Desa Watudemba telah memberikan dampak positif, antara lain: peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, penguatan ketahanan keluarga dari aspek ekonomi dan kesehatan dan terbentuknya komunitas belajar dan usaha berbasis keluarga. Namun demikian, tantangan yang dihadapi meliputi; keterbatasan dana operasional kegiatan, masih belum optimalnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan PKK dan adanya keterbatasan kapasitas kader dalam perencanaan dan pelaksanaan program

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang implementasi gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Desa Watudemba Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward C.III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Komunikasi dalam implementasi gerakan PKK di Desa Watudemba Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa, pengurus dan kader. Hal ini dapat dilihat dari terimplementasinya program-program PKK melalui kejelasan informasi, konsistensi pesan dari tingkat atas sampai ke desa dan adanya saluran komunikasi efektif yang digunakan.
- b. Sumberdaya dalam implementasi gerakan PKK di Desa Watudemba telah tersedia yaitu pengurus, kader dan anggota masyarakat sehingga program-program pokok PKK dapat berjalan dengan baik. Meskipun diakui bahwa sumber daya keuangan untuk menggerakkan kegiatan PKK masih terbatas.
- c. Disposisi (sikap pelaksana) telah berjalan dengan baik sehingga implementasi gerakan PKK di Desa Watudemba Kecamatan Palangga telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari Sikap pelaksana yang responsive, bertanggung jawab dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan program-program PKK di masyarakat.
- d. Struktur birokrasi telah ada dalam organisasi PKK sesuai dengan pedoman, sehingga implementasi gerakan PKK di Desa Watudemba Kecamatan Palangga telah berjalan dengan baik. Masing-masing pengurus mempunyai tanggung jawab sesuai dengan tugasnya atau kelompok kerjanya.

Referensi

- Anggie Sugita Roseifah. (2022). Implementasi Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Kesehatan di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Fisip Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983). and Public Policy. Scott, Foresman and Company.
- Edward III George. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Lexi J, Moleong. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Matthew B, Miles. A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis. A. Methode Sourcebook .Third Edition.

Wahab, Solichin.2005. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. PN. Bumi Aksara. Jakarta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.